P E M E R I N T A H K O T A B O N T A N G
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Moh. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Bontang Lestari Bontang 75325
Telp. (0548) 20393 Fax. (0548) 20400
Website : www.bapelitbang.bontangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Perangkat Daerah, maka perlu melimpahkan kekuasaan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-ungdang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 37 Tahun 2017 tentang kedudukan susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;

12. Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/299/BPKAD/2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 16 Mei 2019;

Memperhatikan : 1. DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang Tanggal 26 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama-nama tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : 1. PPK sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas :
   1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
   2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
   3. Menetapkan rancangan kontrak;
   4. Menetapkan HPS;
   5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
   6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
   7. Menetapkan tim pendukung;
   8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
   9. Melaksanakan E-puerchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
   10. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
   11. Mengendalikan kontrak;
   12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
   13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. Menilai kinerja penyedia.

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
   a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
   b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

3. PPK dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal, 02 Januari 2020
Kepala,

Ir. AMIRUDDIN, MP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19650505 199303 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Bontang
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Inspektur Daerah Kota Bontang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang
5. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG TAHUN 2020
NOMOR : 01 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

NO	NAMA/NIP/JABATAN		Nama Kegiatan	Pagu Dana
1	**M. CHOLIS EDY PRABOWO, ST. M.Si**	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.050.000
	NIP. 196910232000031008	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	27.540.000
	Sekretaris	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.590.000
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.947.500
		5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	4.175.000
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	630.592.000
		7	Penyediaan Makanan dan Minuman	149,840.000
		8	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	481.523.400
		9	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	61.180.000
		10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	409.174.800
		11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	35.000.000
		12	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	150.000.000
		13	Pendidikan dan Pelatihan Formal	138.020.000
		14	Pelaksaanaan Pameran Pembangunan	49.435.000
		15	Publikasi Kegiatan Pembangunan	60.000.000
		16	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	101.625.000
			Jumlah	**2.511.692.700**
2	**FEBTRI MANIK, S.H. M.Si**	1	Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	550.000.000
	Nip. 197502082001121003	2	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	50.085.500
	Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	3	Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	307.223.500
		4	Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Insfatruktur dan Prasarana Wilayah	279.390.000
		5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perhubungan dan Komunikasi	24.523.500
		6	Penyusunan Master Plan Drainase	357.600.000
		7	Penyusunan Review RISPAM	434.160.000
		8	Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	258.878.500
		9	Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air	24.625.000
		10	Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	9.975.000
		11	Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	75.527.500
		12	Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	17.775.000
			Jumlah	**2.389.763.500**

NO	NAMA/NIP/JABATAN		Nama Kegiatan	Pagu Dana
3	**SYAHRUDDIN, SE.MA.M.Eng**	1	Penetapan RKPD	97.535.000
	NIP. 197402102005021001	2	Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	57.835.000
	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	3	Penyusunan dan Penetapan RKPD Perubahan	39.900.000
		4	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	21.975.000
		5	Workshop Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	52.210.000
		6	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	24.300.000
		7	Penyusunan Rancangan Tenokratik RPJMD	321.455.000
		8	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	72.730.000
		9	Monitoring Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	99.345.000
		10	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	26.750.000
		11	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	79.960.000
		12	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	33.400.000
		13	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	80.485.000
		14	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	398.805.000
		15	Dukungan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	392.115.000
			Jumlah	**1.798.800.000**
	Hj. NURHIDAYAH, S.Pi. MP	1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	71.300.000
	NIP. 196702251996032005	2	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahaan dan Aparatur	48.800.000
	Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur	3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	156.970.000
		4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.280.000
		5	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.262.500
		6	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	224.200.000
		7	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	25.000.000
		8	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	29.687.500
			Jumlah	**622.500.000**

Bontang, 2 Januari 2020

Kepala,

Ir. AMIRUDDIN, MT

NIP. 196505051993031013